

ADMINISTRASI PUBLIK DI ERA DIGITAL

Agus Suherman, S.Pd., M.Si



PT PENERBIT NAGA PUSTAKA

ADMINISTRASI PUBLIK DI ERA DIGITAL

Penulis :

Agus Suherman, S.Pd., M.Si

ISBN :

978-634-7346-72-8

Editor :

Adila Meri Pratiwi

Penyunting :

PT Penerbit Naga Pustaka

Desain Cover dan Layout :

PT Penerbit Naga Pustaka

Penerbit :

PT Penerbit Naga Pustaka

Redaksi :

Office Center: Bekasi Utara

Office Cabang: Yogyakarta

Office : 0889-8889-7779

Marketing : 0856-9234-2380

Instagram: @nagapustaka_penerbit

Website: <https://nagapustaka.store/>

E-mail: nagapustaka8@gmail.com

Cetakan Pertama **Oktober 2025**

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat terselesaikan. Buku ini hadir sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Administrasi Publik di Era Digital, sebuah konsep modern dalam tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi, big data, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan inovasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik, transparansi, serta akuntabilitas.

Transformasi digital dalam administrasi publik telah menjadi keniscayaan di era modern, di mana kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat, efisien, dan responsif semakin meningkat. Buku ini membahas berbagai aspek penting, mulai dari digitalisasi global, e-government, smart governance, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur negara yang adaptif terhadap teknologi. Selain itu, penekanan pada digital citizenship, tanggung jawab sosial, dan kolaborasi lintas sektor menegaskan bahwa administrasi publik digital bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga terkait dengan partisipasi masyarakat, etika, dan tata kelola yang berkelanjutan.

Buku ini disusun dengan pendekatan akademik dan praktis, dilengkapi referensi jurnal internasional dan studi kasus yang relevan, sehingga diharapkan dapat menjadi panduan bagi mahasiswa, peneliti, aparatur pemerintah, maupun praktisi administrasi publik. Penulis berharap buku ini dapat memberikan wawasan baru, memperluas pemahaman tentang transformasi digital di sektor publik, dan mendorong implementasi administrasi publik yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan dari para

pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan di edisi berikutnya. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan implementasi pemerintahan digital yang berkualitas.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KONSEP DASAR ADMINISTRASI PUBLIK	1
A. Definisi Administrasi Publik	2
B. Sejarah Perkembangan Administrasi Publik	3
C. Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis	4
D. Peran Administrasi Publik dalam Pemerintahan	5
E. Administrasi Publik di Era Modern	6
BAB 2 ERA DIGITAL DAN TRANSFORMASI	
PEMERINTAHAN	9
A. Pengertian Era Digital	10
B. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	11
C. Konsep Transformasi Digital dalam Pemerintahan.....	12
D. Smart Governance dan Smart City.....	13
E. Isu Etika dan Privasi di Era Digital	14
BAB 3 E-GOVERNMENT DAN INOVASI LAYANAN	
PUBLIK	16
A. Konsep E-Government.....	17
B. Tahapan Pengembangan E-Government	18
C. Implementasi E-Government di Indonesia.....	19
D. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital	20
E. Evaluasi Keberhasilan E-Government	22

BAB 4 ADMINISTRASI BERBASIS DATA DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI).....	24
A. Peran Big Data dalam Administrasi Publik.....	25
B. Pemanfaatan Data untuk Pengambilan Keputusan.....	26
C. AI dan Otomatisasi Proses Administratif.....	27
D. Risiko dan Tantangan Penggunaan AI.....	28
E. Etika dalam Penggunaan AI untuk Pelayanan Publik	30
BAB 5 DESENTRALISASI DAN ADMINISTRASI DIGITAL DI DAERAH.....	32
A. Konsep Desentralisasi dalam Administrasi Publik.....	33
B. E-Government pada Pemerintah Daerah.....	34
C. Digitalisasi Birokrasi di Tingkat Lokal	36
D. Kapasitas SDM Daerah	37
E. Kolaborasi Antar Pemerintah Daerah dan Pusat	38
BAB 6 TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DIGITAL	40
A. Makna Transparansi dalam Administrasi Publik.....	41
B. Sistem Informasi Publik dan Keterbukaan Data	42
C. Akuntabilitas Berbasis Digital	43
D. Peran Teknologi dalam Pemberantasan Korupsi.....	44
E. Aplikasi Pelaporan dan Pengawasan Masyarakat	46
BAB 7 REFORMASI BIROKRASI DI ERA DIGITAL	48
A. Urgensi Reformasi Birokrasi.....	49
B. Digitalisasi Proses Administratif.....	50
C. Penyederhanaan Struktur Organisasi	51
D. Sistem Merit dan Profesionalisme ASN.....	52

E.	Monitoring dan Evaluasi Digital	54
BAB 8 PELAYANAN PUBLIK DIGITAL YANG INKLUSIF		56
A.	Prinsip Keadilan dalam Layanan Publik Digital	57
B.	Aksesibilitas Teknologi bagi Masyarakat Marginal	58
C.	Gender dan Pelayanan Digital	59
D.	Layanan Publik Berbasis Aplikasi Mobile	60
E.	Studi Kasus Layanan Inklusif di Indonesia	62
BAB 9 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DIGITAL		64
A.	Digitalisasi Sistem Kepegawaian	65
B.	Rekrutmen ASN Berbasis Online	66
C.	Pengembangan Kompetensi Digital ASN	67
D.	Penilaian Kinerja Berbasis Teknologi	69
E.	Manajemen Perubahan SDM	70
BAB 10 KEPEMIMPINAN DIGITAL DALAM		
ADMINISTRASI PUBLIK		73
A.	Karakteristik Pemimpin di Era Digital	74
B.	Kepemimpinan Transformasional dan Teknologi	76
C.	Pengambilan Keputusan Berbasis Data	77
D.	Penguatan Budaya Digital di Organisasi	78
E.	Studi Kepemimpinan Digital di Instansi Pemerintah	80
BAB 11 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM		
ADMINISTRASI DIGITAL		82
A.	Konsep Partisipasi Publik Digital	83
B.	Media Sosial dan Aspirasi Publik	84

C.	E-Participation dan E-Voting	85
D.	Platform Pengaduan Online (LAPOR!, Qlue, dll.)	87
E.	Kolaborasi Pemerintah dan Komunitas Digital.....	88
BAB 12 KEAMANAN SIBER DAN ADMINISTRASI PUBLIK		
.....		90
A.	Ancaman Siber terhadap Administrasi Pemerintah.....	91
B.	Keamanan Data dan Privasi Warga	92
C.	Strategi Cybersecurity Sektor Publik	93
D.	Peraturan Perundangan Perlindungan Data	94
E.	Peran ASN dalam Menjaga Keamanan Digital	95
BAB 13 PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAHAN		
DIGITAL		97
A.	Indikator Kinerja Berbasis Digital	97
B.	Sistem Monitoring dan Evaluasi Otomatis.....	98
C.	Dashboard Kinerja Instansi Publik.....	99
D.	Laporan Kinerja Berbasis Teknologi.....	100
E.	Studi Kasus Pemanfaatan Sistem Kinerja Digital	102
BAB 14 KOLABORASI LINTAS SEKTOR DI ERA DIGITAL		
.....		104
A.	Kolaborasi dalam Administrasi Publik.....	105
B.	Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP) Digital.....	106
C.	Kolaborasi Akademisi, NGO, dan Pemerintah.....	107
D.	Integrasi Data Lintas Lembaga	108
E.	Governance Network di Era Teknologi.....	109
BAB 15 ADMINISTRASI PUBLIK DIGITAL		111

A.	Digitalisasi Global dalam Sektor Publik	112
B.	Administrasi Publik 5.0.....	113
C.	Digital Citizenship dan Tanggung Jawab Sosial	114
D.	Peran Pendidikan Administrasi Publik Digital.....	115
E.	Visi Pemerintahan Digital Berkelanjutan.....	116
DAFTAR PUSTAKA		118
PROFIL PENULIS		122

BAB 1

KONSEP DASAR ADMINISTRASI PUBLIK

Administrasi publik merupakan suatu disiplin ilmu sekaligus praktik yang berfokus pada bagaimana pemerintah, lembaga publik, serta organisasi non-pemerintah mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara sederhana, administrasi publik dapat dipahami sebagai proses penyelenggaraan kepentingan umum melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan yang dilakukan oleh aparatur negara maupun organisasi publik lainnya. Keberadaan administrasi publik menjadi penting karena berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dengan pelayanan nyata yang diterima oleh masyarakat.

Dalam perkembangannya, administrasi publik tidak hanya berorientasi pada birokrasi tradisional yang menekankan aturan dan hierarki, tetapi juga mencakup paradigma baru seperti *New Public Management* (NPM) yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada hasil. Bahkan, saat ini berkembang pula konsep *Governance* yang lebih menitikberatkan pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi publik bersifat dinamis, selalu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi.

Selain itu, administrasi publik memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara. Dengan demikian, studi mengenai konsep dasar administrasi publik tidak hanya penting bagi aparatur pemerintah, tetapi juga bagi akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami

bagaimana proses pelayanan publik dijalankan serta bagaimana kebijakan publik dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari.

A. Definisi Administrasi Publik

Administrasi publik pada dasarnya merupakan suatu disiplin ilmu sekaligus praktik yang mempelajari bagaimana kebijakan publik dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam rangka mencapai kepentingan masyarakat luas. Istilah ini mengacu pada seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan program-program publik. Salah satu tokoh perintis administrasi publik, administrasi publik adalah kegiatan yang terpisah dari politik dan berfokus pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif maupun eksekutif. Definisi ini kemudian berkembang, salah satunya yang menekankan bahwa administrasi publik tidak hanya menyangkut aspek teknis birokrasi, tetapi juga nilai-nilai sosial, etika, dan demokrasi yang mendasari tindakan pemerintah.

Dengan demikian, administrasi publik dapat dipahami sebagai kombinasi antara teori, prinsip, serta praktik penyelenggaraan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Administrasi publik tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi juga pada efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara. Perbedaan definisi dari para ahli menunjukkan bahwa administrasi publik adalah konsep yang luas, multidimensional, dan selalu berkembang sesuai dengan konteks sosial, politik, ekonomi, serta tantangan zaman.

B. Sejarah Perkembangan Administrasi Publik

Sejarah perkembangan administrasi publik dimulai pada akhir abad ke-19 ketika Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat yang juga seorang akademisi, menulis esai berjudul *The Study of Administration* (1887). Dalam tulisannya, Wilson menekankan pentingnya memisahkan politik dan administrasi, dengan asumsi bahwa administrasi publik harus fokus pada pelaksanaan kebijakan secara efisien, sementara politik berkaitan dengan proses perumusan kebijakan. Pandangan ini dikenal sebagai paradigma *dichotomy politics-administration* yang kemudian menjadi dasar lahirnya ilmu administrasi publik sebagai disiplin akademik tersendiri.

Pada abad ke-20, administrasi publik mengalami perkembangan pesat seiring dengan munculnya berbagai teori manajemen dan organisasi. Era awal menekankan pada prinsip-prinsip birokrasi ala Max Weber yang berorientasi pada hierarki, aturan formal, dan rasionalitas. Selanjutnya, muncul aliran *scientific management* dari Frederick W. Taylor yang menekankan efisiensi kerja dan produktivitas. Pada periode ini, administrasi publik dipandang sebagai ilmu yang menekankan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi pemerintah.

Memasuki pertengahan abad ke-20, terjadi perubahan paradigma melalui gerakan *Human Relations* yang menekankan pentingnya faktor manusia, motivasi, dan hubungan sosial dalam organisasi. Hal ini membuat administrasi publik tidak lagi hanya fokus pada struktur birokrasi, tetapi juga pada perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Kemudian, pada tahun 1960-an hingga 1970-an, muncul gerakan *New Public Administration* yang lebih menekankan pada nilai keadilan sosial, partisipasi masyarakat, serta kepekaan terhadap isu-isu kemanusiaan.

Sejak tahun 1980-an, administrasi publik memasuki era *New Public Management* (NPM) yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip manajemen sektor swasta. NPM menekankan pada efisiensi, efektivitas, orientasi hasil, serta pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada tahap selanjutnya, berkembang pula konsep *Good Governance* dan *New Public Service* yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kolaborasi, serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa administrasi publik adalah disiplin yang dinamis, selalu beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Dari birokrasi tradisional hingga tata kelola pemerintahan modern, administrasi publik terus mencari bentuk ideal untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

C. Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis

Administrasi publik dan administrasi bisnis sering kali dipandang memiliki kesamaan karena keduanya sama-sama berfokus pada pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, keduanya berbeda dari segi orientasi, tujuan, serta lingkungan operasional. Administrasi publik berorientasi pada kepentingan umum dan pelayanan masyarakat, sedangkan administrasi bisnis lebih menekankan pada keuntungan finansial serta keberlangsungan usaha. Dengan kata lain, administrasi publik berlandaskan pada prinsip kesejahteraan sosial dan keadilan,

sementara administrasi bisnis bertumpu pada efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas.

Dalam praktiknya, administrasi publik diimplementasikan pada organisasi sektor publik seperti lembaga pemerintahan, badan pelayanan umum, maupun institusi non-profit. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang adil, merata, dan akuntabel kepada masyarakat. Sebaliknya, administrasi bisnis diterapkan pada perusahaan atau organisasi sektor swasta yang berfokus pada pencapaian laba serta kepuasan pelanggan. Walaupun berbeda tujuan, keduanya memiliki persamaan dalam penggunaan prinsip manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, serta evaluasi kinerja.

Seiring dengan perkembangan zaman, batas antara administrasi publik dan administrasi bisnis semakin cair. Munculnya konsep *New Public Management* (NPM) misalnya, menghadirkan pendekatan manajemen sektor swasta ke dalam administrasi publik dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun administrasi publik dan bisnis memiliki orientasi yang berbeda, keduanya saling melengkapi dan dapat saling belajar dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

D. Peran Administrasi Publik dalam Pemerintahan

Administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi instrumen utama dalam menghubungkan kebijakan dengan pelayanan nyata kepada masyarakat. Melalui administrasi publik, berbagai kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan ke dalam program-program konkret

ADMINISTRASI PUBLIK DI ERA DIGITAL



Agus Suherman, S.Pd., M.Si